

ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

Muhammad Japar^{*1}, Dr. Rustam DM², Dr. Abdul Rahman Abdi³

*1Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

2Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

3Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

E-mail: ^{*1}jjapar943@gmail.com, ²rustandm66@gmail.com, ³abdulrahman@stienobel-indonesia.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Kabupaten Gowa, Menganalisis rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan daerah serta pertumbuhan pendapatan Kabupaten Gowa.

Metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis rasio kontribusi, Rasio Kemandirian dan rasio ketergantungan keuangan serta pertumbuhan daerah Kabupaten Gowa. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Daerah, serta berapa besar tingkat kemandirian dan ketergantungan keuangan serta pertumbuhan pendapatan Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil Penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai 2019 Kontribusi PAD Kabupaten Gowa masih kurang dengan kontribusi rata-rata sebesar 12,44%, Kontribusi DAU mendominasi pendapatan daerah dengan rata-rata persentasi sebesar 49,74 % dari pendapatan daerah, tingkat kemandirian keuangan daerah juga masih kurang rata-rata sebesar 12,62 % dan tingkat ketergantungan keuangan daerah masih tinggi rata-rata 85,36 % mengalami tren menurun.

Kata Kunci : Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi Dana Alokasi Umum, Kontribusi Dana Alokasi Khusus, kemandirian keuanga dan Ketergantungan Keuangan Daerah serta pertumbuhan Pendapatan daerah.

Abstract

Muhammad Japar "Analysis of the Contribution of Regional Original Income, General Allocation Funds and Special Allocation Funds to Gowa Regency Regional Revenue". (Supervised by Rustam DM and Abdul Rahman Abdi).

The purpose of this study was to analyze and determine the contribution of Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds to Gowa Regency's Revenues, to analyze the ratio of Regional Financial Independence and Dependence and the growth of Gowa Regency's income.

This study uses qualitative research methods. The data collection technique used in this research is documentation. The research method used is the analysis of the contribution ratio, the ratio of independence and the ratio of financial dependence as well as the regional growth of Gowa Regency. To find out how much contribution can be contributed from the receipt of Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund to Regional Income, as well as how much the level of independence and financial dependence and income growth of Gowa Regency.

Based on the results of the study, from 2015 to 2019 the contribution of Gowa Regency's Original Regional Revenue was still lacking with an average contribution of 12.44%, the Contribution of the General Allocation Fund dominated regional income with an average percentage of 49, 74% of regional income, the level of regional financial independence is also still less on average by 12.62% and the level of regional financial dependence is still high on average 85.36% experiencing a downward trend.

Keywords: Contribution of Regional Original Income , Contribution of General Allocation Funds , Contribution of Special Allocation Funds , financial independence and Regional Financial Dependence and growth of regional income.

PENDAHULUAN

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas beberapa daerah provinsi. Daerah-daerah provinsi terbagi atas beberapa Kabupaten dan Kota. Setiap daerah tentunya tidak dapat terlepas dari adanya peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Otonomi dilandaskan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dilandaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ,digantikan oleh Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan digantikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah disebutkan bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, lain-lain pendapatan yang sah dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam didaerahnya. Di samping dana perimbangan Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah, pembiayaan dan lain-lain pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh sebab itu kemampuan suatu daerah untuk menggali Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan di daerah tersebut. Disamping hal tersebut semakin besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD maka akan semakin kecil pula ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintahan pusat. Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber yang berasal dari luar Pendapatan Asli Daerah karena Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah itu sendiri demi kelancaran dan penyelenggaraan urusan daerahnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Mardiasmo yang dikutip dalam bukunya menjelaskan bahwa saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap Pendapatan Daerah apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat.

Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai Belanja di daerahnya. Namun pada kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah.

Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari DAU, dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam APBD.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Dana Alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, termasuk yang berasal dari dana reboisasi. Kebutuhan khusus yang dimaksud yaitu kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan/atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan sangat memiliki peran yang besar bagi sumber pembiayaan pembangunan dan pada akhirnya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut. Penurunan kegiatan ekonomi di berbagai daerah juga akan menyebabkan penurunan Pendapatan Asli Daerah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom. Begitu juga sebaliknya, apabila terjadi peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai daerah juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah tidak akan terhambat.

Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia yaitu di bidang keuangan daerah, relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gambar 1. Realisasi Pendapatan Daerah



PAD yang masih rendah mengindikasikan daerah tersebut belum mampu membangun secara mandiri tanpa bergantung pada Pendapatan Transfer.

Tujuan dari transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan tercapainya standar pelayanan publik. Adanya transfer dana ini bagi pemerintah daerah sebagai sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri yaitu PAD, namun pada praktiknya transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah, yang oleh

pemerintah daerah dilaporkan diperhitungkan APBD. Harapan Pemerintah pusat dana transfer tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula dilakukan secara transparan.

Kabupaten Gowa sebagai salah satu pemerintah daerah kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan telah berhasil meraih opini WTP sebanyak 9 (sembilan) kali secara berturut-turut dari BPK RI dari tahun 2011 sampai dengan 2019. Prestasi ini merupakan sebuah keberhasilan yang tidak mudah diraih begitu saja dan tentu akan menjadi impian dari setiap institusi dalam hal pengelolaan keuangan. Namun apakah dengan capaian ini pemerintah daerah Kabupaten Gowa telah mencapai kemandirian keuangan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang merata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana sosial yang dapat memperlancar roda perekonomian masyarakat Kabupaten Gowa. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio (Halim, 2003: L-2).

Peneliti akan menganalisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pendapatan daerah di Kabupaten Gowa, peneliti juga akan menganalisis rasio kemandirian dan ketergantungan keuangan serta pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Gowa.

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Berapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gowa ?, Berapa besar kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gowa ?, Berapa besar kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gowa ?, Berapa besar Kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Gowa?, Berapa Besar ketergantungan keuangan daerah di Kabupaten Gowa?, Berapa besar pertumbuhan pendapatan kabupaten Gowa?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan dengan unit analisisnya adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Gowa. Jenis penelitian berupa penelitian Deskriptif kualitatif.

Sumber data berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2015-2019 berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil DAU dan DAK, Transfer Pemerintahan Pusat-lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi) dan Lain-lain PAD Yang Sah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik Dokumentasi metode ini dilakukan dengan melihat, mempelajari dan meneliti kegiatan di instansi pemerintahan melalui dokumen dan data yang digunakan.

Untuk menilai besarnya kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAU) terhadap APBD dapat diinterpretasikan pada kriteria yang dikeluarkan oleh Kemendagri No 690.900.327 tahun 1996 sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Kontribusi

Rasio Kontribusi %	Kriteria
Kurang Dari 0 %	Sangat Kurang
Di atas 10% - 20%	Kurang
Di atas 20% - 30%	Sedang
Di atas 30% - 40%	Cukup
Di atas 40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kemendagri No.690.900.327 Tahun 1996 Nita Atika Maret 2020

HASIL PENELITIAN

Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan daerah Kabupaten Gowa

Perhitungan kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah.

$$P_n = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

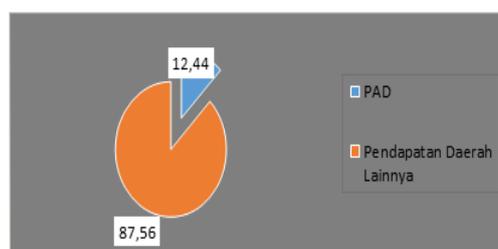
Keterangan:

P_n = Jumlah Kontribusi

n = Tahun (periode) tertentu

Kontribusi Tahun 2015	=	$\frac{154.772.384.000}{1.450.811.765.394} \times 100 \%$
	=	10,67
Kontribusi Tahun 2016	=	$\frac{187.176.036.300}{1.612.246.983.359} \times 100 \%$
	=	11,61
Kontribusi Tahun 2017	=	$\frac{268.339.203.299}{1.790.263.499.730} \times 100 \%$
	=	14,99
Kontribusi Tahun 2018	=	$\frac{217.112.642.503}{1.781.396.471.000} \times 100 \%$
	=	12,19
Kontribusi Tahun 2019	=	$\frac{238.239.570.975}{1.870.608.908.441} \times 100 \%$
	=	12,74
Rata-Rata Kontribusi PAD	=	12,44 %

Gambar 2. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan daerah



Tabel 1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Pendapatan Daerah	Kontribusi %	Kriteria
2015	154.772.384.000,10	1.450.811.765.394,00	10,67	Kurang
2016	187.176.036.300,40	1.612.246.983.358,60	11,61	Kurang
2017	268.339.203.299,15	1.790.263.499.730,15	14,99	Kurang
2018	217.112.642.503,37	1.781.396.471.000,37	12,19	Kurang
2019	238.239.570.974,67	1.870.608.908.440,64	12,74	Kurang

Sumber Data: BPKD Kab. Gowa, Data Diolah 2021

Berdasarkan skala interval kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) Terhadap pendapatan daerah untuk Pemerintah Kabupaten Gowa pada tahun 2015 s/d 2019 mengalami Fluktuasi , pada tahun 2015 PAD Kab Gowa memberikan kontribusi sebesar 10,67% dari total Realisasi Pendapatan dengan kriteria kurang. pada tahun 2016 mengalami peningkatan kontribusi menjadi 11,61% dengan kriteria kurang, yang terbesar pada tahun 2017 PAD kab Gowa memberikan kontribusi sebesar 14,99 % hal ini disebabkan karena terjadi Kenaikan signifikan pada pendapatan lain-lain PAD yang sah yaitu sebesar Rp. 82.037.950.191. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan kontribusi menjadi 12,19% dengan kriteria kurang. Kemudian tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi 12,74% dengan kriteria kurang maka sesuai dengan tabel diatas bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah Kabupaten Gowa berada pada kriteria kurang.

Analisis Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pendapatan daerah Kabupaten Gowa

Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Melalui

$$P_n = \frac{\text{Dana Alokasi Umum (DAU)}}{\text{Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

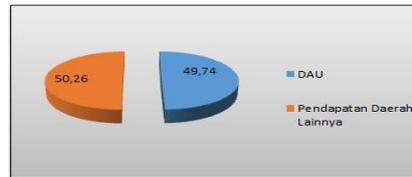
Keterangan:

P_n = Jumlah Kontribusi ,

n = Tahun (periode) tertentu

Kontribusi Tahun 2015	=	$\frac{795.078.108.000}{1.450.811.765.394}$	$\times \frac{100}{\%}$
	=	54,80	
Kontribusi Tahun 2016	=	$\frac{850.677.296.000}{1.612.246.983.359}$	$\times \frac{100}{\%}$
	=	52,76	
Kontribusi Tahun 2017	=	$\frac{835.733.631.000}{1.790.263.499.730}$	$\times \frac{100}{\%}$
	=	46,68	
Kontribusi Tahun 2018	=	$\frac{837.326.483.000}{1.781.396.471.000}$	$\times \frac{100}{\%}$
	=	47,00	
Kontribusi Tahun 2019	=	$\frac{887.926.896.000}{1.870.608.908.441}$	$\times \frac{100}{\%}$
	=	47,47	
Rata-rata Kontribusi DAU	=	49,74	%

Gambar 3. Kontribusi DAU Terhadap Pendapatan daerah



Tabel 2. Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendaptan Daerah

Tahun	Dana Alokasi Umum (DAU)	Realisasi Pendapatan Daerah	Kontribusi %	Kriteria
2015	795.078.108.000,00	1.450.811.765.394,00	54,80	Sangat Baik
2016	850.677.296.000,00	1.612.246.983.358,60	52,76	Sangat Baik
2017	835.733.631.000,00	1.790.263.499.730,15	46,68	Baik
2018	837.326.483.000,00	1.781.396.471.000,37	47,00	Baik
2019	887.926.896.000,00	1.870.608.908.440,64	47,47	Baik

Sumber Data: BPKD Kab. Gowa, Data Diolah 2021

Berdasarkan skala interval kontribusi Dana Alokasi umum (DAU) terhadap pendaptan Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2015 s/d 2019 mengalami Fluktuasi pada tahun 2015 Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Gowa memberikan kontribusi sebesar 54,80% dari total Realisasi Pendapatan dengan kriteria Sangat Baik. pada tahun 2016 mengalami penurunan kontribusi menjadi 52,76% dengan kriteria Sangat Baik. Dari segi kontribusi menurun tapi dari segi jumlah pendapatan meningkat sebesar Rp. 161.405.217.965,- dari realisasi pendaptan tahun 2015 sebesar Rp. 1.450.811.765.394,- menjadi 1.612.246.983.359 ditahun 2016 , ditahun 2017 mengalami penurunan kontribusi menjadi 46,68 % dari total Realisasi Pendapatan daerah dengan kriteria Baik , di tahun 2018 mengalami peningkatan kontribusi dari tahun sebelumnya menjadi 47,00% dari pendaptan daerah dengan kriteria dan ditahun 2019 mengalami peningkatn kontribusi terhadap pendapatan daerah menjadi 47,47 % dari pendaptan Daerah dengan kriteria Baik .

Analisis Kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pendapatan daerah Kabupaten Gowa

Kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Melalui:

$$P_n = \frac{\text{Dana Alokasi Khusus (DAK)}}{\text{Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

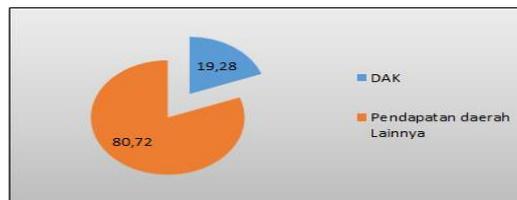
Keterangan:

P_n = Jumlah Kontribusi ,

n = Tahun (periode) tertentu

Kontribusi Tahun 2015	=	$\frac{138.951.270.000}{1.450.811.765.394}$	X 100 %
	=	9,58	
Kontribusi Tahun 2016	=	$\frac{347.707.840.410}{1.612.246.983.359}$	X 100 %
	=	21,57	
Kontribusi Tahun 2017	=	$\frac{445.496.853.580}{1.790.263.499.730}$	X 100 %
	=	24,88	
Kontribusi Tahun 2018	=	$\frac{380.981.631.681}{1.781.396.471.000}$	X 100 %
	=	21,39	
Kontribusi Tahun 2019	=	$\frac{355.307.288.919}{1.870.608.908.441}$	X 100 %
	=	18,99	
Rata-rata Kontribusi DAK	=	19,28 %	

Gambar 4. Kontribusi DAK Terhadap Pendapatan daerah



Tabel 3. Kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pendapatan Daerah

Tahun	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Realisasi Pendapatan Daerah	Kontribusi %	Kriteria
2015	138.951.270.000,00	1.450.811.765.394,00	9,58	Sangat Kurang
2016	347.707.840.410,00	1.612.246.983.358,60	21,57	Sedang
2017	445.496.853.580,00	1.790.263.499.730,15	24,88	Sedang
2018	380.981.631.681,00	1.781.396.471.000,37	21,39	Sedang
2019	355.307.288.919,00	1.870.608.908.440,64	18,99	Kurang

Sumber Data: BPKD Kab. Gowa, Data Diolah 2021

Berdasarkan skala interval kontribusi Dana Alokasi khusus (DAK) terhadap pendapatan daerah kabupaten Gowa pada tahun 2015 s/d 2019 mengalami Fluktuasi, pada tahun 2015 Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab Gowa memberikan kontribusi sebesar 9,58% dari total Realisasi Pendapatan Daerah dengan kriteria sangat kurang. pada tahun 2016 mengalami peningkatan kontribusi menjadi 21,57% dengan kriteria sedang, yang terbesar pada tahun 2017 Dana Alokasi Khusus kab Gowa memberikan kontribusi sebesar 24,88 % dengan kriteria Sedang. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan kontribusi menjadi 21,39% dengan kriteria sedang. Kemudian tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 18,99% dengan kriteria kurang.

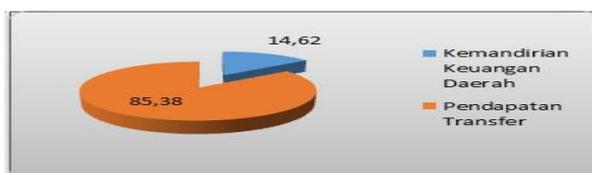
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan kabupaten Gowa Melalui :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer + Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian Tahun 2015	=	$\frac{154.772.384.000}{1.295.542.132.864}$	X 100 %
	=	11,95	
Rasio kemandirian Tahun 2016	=	$\frac{187.176.036.300}{1.422.740.175.918}$	X 100 %
	=	13,16	
Rasio kemandirian Tahun 2017	=	$\frac{268.339.203.299}{1.500.503.485.481}$	X 100 %
	=	17,88	
Rasio kemandirian Tahun 2018	=	$\frac{217.112.642.503}{1.477.952.776.948}$	X 100 %
	=	14,69	
Rasio kemandirian Tahun 2019	=	$\frac{238.239.570.975}{1.542.776.177.466}$	X 100 %
	=	15,44	
Rata-rata kemandirian keuangan	=	14,62 %	

Gambar 5. Rasio Kemandirian Keuangan daerah



Tabel 4. Rasio Kemandirian keuangan daerah

Tahun	Pendapatan Asli daerah	Pendapatan Transfer	% Rasio Kemandirian
2015	154.772.384.000,10	1.295.542.132.863,90	11,95
2016	187.176.036.300,40	1.422.740.175.918,20	13,16
2017	268.339.203.299,15	1.500.503.485.481,00	17,88
2018	217.112.642.503,37	1.477.952.776.948,00	14,69
2019	238.239.570.974,67	1.542.776.177.465,97	15,44

Sumber Data: BPKD Kab. Gowa, Data Diolah 2021

Berdasarkan Tabel diatas kemandirian keuangan daerah dari tahun 2015 s/d 2019 mengalami fluktuatif ini dapat dilihat bahwa tahun 2015 tingkat rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten gowa sebesar 11,95 % , ditahun 2016 mengalami peningkatan rasio kemandirian menjadi 13,16 % , ditahun 2017 mengalami

peningkatan rasio kemandirian keuangan menjadi 17,88% atau merupakan rasio tertinggi. di tahun 2018 mengalami penurunan rasio menjadi 14,69 % dan tahun 2019 kembali mengalami peningkatan rasio kemandirian keuangan menjadi 15,44%.

Dari data diatas tingkat kemandirian keuangan kabupaten gowa masih sangat rendah sangat perlu langkah-langka yang mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah , menganilisi Potensi-potensi daerah untuk dapat dikembangkan dapat dilihat dari realisasi PAD Perkembangan PAD dari segi pajak daerah meningkat setiap tahunnya.

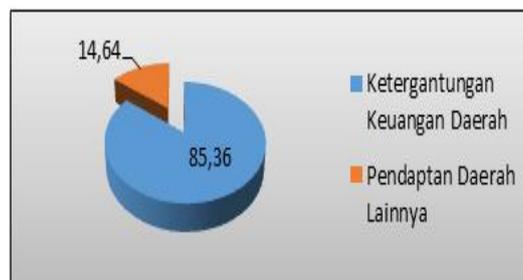
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan keuangan dihitung dengan formula sebagai berikut (BPKP, 2012):

$$\text{Ketergantungan Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio ketergantungan Tahun 2015	=	$\frac{1.295.542.132.864}{1.450.811.765.394}$	X 100 %
	=	89,30	
Rasio ketergantungan Tahun 2016	=	$\frac{1.422.740.175.918}{1.612.246.983.359}$	X 100 %
	=	88,25	
Rasio ketergantungan Tahun 2017	=	$\frac{1.500.503.485.481}{1.790.263.499.730}$	X 100 %
	=	83,81	
Rasio ketergantungan Tahun 2018	=	$\frac{1.477.952.776.948}{1.781.396.471.000}$	X 100 %
	=	82,97	
Rasio ketergantungan Tahun 2019	=	$\frac{1.542.776.177.466}{1.870.608.908.441}$	X 100 %
	=	82,47	
Rata-rata ketergantungan Keuangan	=	85,36 %	

Gambar 6. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah



Tabel 5. Rasio Ketergantungan Keuangan

Tahun	Pendapatan Transfer	Pendapatan Daerah	% Rasio Ketergantungan
2015	1.295.542.132.863,90	1.450.811.765.394,00	89,30
2016	1.422.740.175.918,20	1.612.246.983.358,60	88,25
2017	1.500.503.485.481,00	1.790.263.499.730,15	83,81
2018	1.477.952.776.948,00	1.781.396.471.000,37	82,97
2019	1.542.776.177.465,97	1.870.608.908.440,64	82,47

Sumber Data: BPKD Kab. Gowa, Data Diolah 2021

Berdasarkan Tabel diatas ketergantungan keuangan daerah dari tahun 2015 s/d 2019 mengalami penurunan tingkat ketergantungan ini dapat dilihat bahwa tahun 2015 tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten gowa sebesar 89,30 % , ditahun 2016 mengalami penurunan rasio ketergantungan menjadi 88,25 % , ditahun 2017 mengalami penurunan rasio ketergantungan keuangan menjadi 83,81% .di tahun 2018 mengalami penurunan rasio menjadi 82,97 % dan tahun 2019 kembali mengalami penurunan rasio ketergantungan keuangan menjadi 82,47%.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

Tabel 6. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Uraian	Realisasi (t)	Realisasi (t-)	%
2016	Pendapatan asli daerah (PAD)	187.176.036.300	154.772.384.000	20,94
2017	Pendapatan asli daerah (PAD)	268.339.203.299	187.176.036.300	43,36
2018	Pendapatan asli daerah (PAD)	217.112.642.503	268.339.203.299	-19,09
2019	Pendapatan asli daerah (PAD)	238.239.570.975	217.112.642.503	9,73

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan pendapatan Asli daerah (PAD) kabupaten gowa mengalami fluktuasi dari tahun 2015 s/d 2016 tumbuh sebesar 20,94 % , ditahun 2016 s/d 2017 tumbuh sebesar 43,36 % , ditahun 2017 s/d 2018 mengalami penurunan dengan persentase sebesar -19,09 % dan ditahun 2018 s/d 2019 meningkat kembali dengan pertumbuhan sebesar 9,73 %

PEMBAHASAN

Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan daerah Kabupaten Gowa

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gowa masih relatif rendah. Terlihat adanya fluktuasi kenaikan dan penurunan persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah selama periode 2015 s/d 2019. Peningkatan terjadi pada tahun 2015,2016, 2017 dan 2019 sedangkan 2018 mengalami penurunan kontribusi dari 14,99% menjadi 12,19 % Penyebab penurunan kontribusi pada tahun 2017 adalah karena adanya perpindahan akun yang sebelumnya dicatat pada lain-lain PAD yang sah ke akun Pendapatan Daerah yang sah dan kurangnya peningkatan penerimaan PAD secara keseluruhan. Sehingga peningkatan kontribusi selama 5 tahun hanya naik sebesar 2,07% sehingga pemerintah daerah kabupaten Gowa dinilai belum mampu menjalankan pemerintahnya sendiri. Hal ini terbukti bahwa dalam hal pendanaan

keuangannya saja pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat, karena dana yang bersumber dari PAD masih sangat minim yaitu sebesar Rp238.239.570.974,67,- ditahun 2019, sementara realisasi pendapatan ditahun yang sama sebesar Rp1.870.608.908.440,64,-. Sehingga kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 hanya sebesar 12,74 % Jumlah PAD yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Gowa tidak terlalu besar untuk dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pendapatan daerah secara keseluruhan. Jika dilihat dari rata-rata persentasi kontribusinya yaitu sebesar 12.44%. Artinya PAD belum terlalu besar memberikan iuran/sumbangan yang berarti bagi pendapatan daerah kabupaten Gowa. Kenyataan ini berarti sama dengan daerah lain pada umumnya di Indonesia, yang menyatakan bahwa kontribusi PAD masih sangat rendah di Indonesia pada umumnya yang seharusnya merupakan sumber keuangan terbesar bagi Pendapatan Daerah. Hal ini merupakan persoalan bagi pemerintah Kabupaten Gowa. Pemerintah harus dapat memecahkan persoalan ini dengan cara terus berupaya keras dalam mengembangkan berbagai potensi PAD yang ada di Kabupaten Gowa (misalnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah) sehingga mampu memberikan kontribusi yang makin besar terhadap Pendapatan Daerah. Tujuannya adalah agar Kabupaten Gowa menjadi daerah yang lebih maju dan mandiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

Analisis Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pendapatan daerah Kabupaten Gowa

Kontribusi DAU terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gowa masih sangat tinggi. Walaupun secara persentase terus mengalami penurunan terhadap pendapatan daerah selama periode 2015 s/d 2019. Penurunan itu terjadi pada tahun 2016 dari 54,80 % menjadi 52,76 % dan menurun kembali di tahun 2017 menjadi 46,68%, sedangkan 2018 mengalami peningkatan kontribusi dari 46,68% % menjadi 47 % dan 47,47 ditahun 2019 sehingga penurunan kontribusi dari tahun 2015 s/d 2019 menurun sebesar 7,33% Penyebab penurunan kontribusi adalah karena adanya peningkatan pendapatan disumber pendapatan yang lain seperti peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber Pendapatan yang lain walaupun secara nominal mengalami peningkatan tetapi secara kontribusi mengalami penurunan ini dapat dilihat dari tahun 2015 mendapat kriteria sangat baik dan menurun ditahun 2019 menjadi Baik dengan kontribusi rata-rata dari tahun 2015 s/d 2019 sebesar 49,74 % yang hampir separuh dari pendapatan daerah kabupaten Gowa.. Artinya DAU merupakan sumber pendapatan terbesar kabupaten Gowa

Analisis Kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pendapatan daerah Kabupaten Gowa

Kontribusi DAK terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gowa mengalami fluktuatif terhadap pendapatan daerah selama periode 2015 s/d 2019. Peningkatan terjadi pada tahun 2016 dari 9,58 % 2015 menjadi 21,57 % dan meningkat kembali di tahun 2017 menjadi 24,88%, sedangkan 2018 mengalami penurunan kontribusi dari 24,88% % menjadi 21,39 % dan menurun kembali menjadi 18,99 ditahun 2019 sehingga peningkatan kontribusi dari tahun 2015 s/d 2019 Peningkatan sebesar 9,41% penyebab tingginya kontribusi dak di tahun 2017 disebabkan karena meningkatnya transferan pusat untuk infrastruktur jalan dan jembatan dari sebesar Rp.130.740.136.000,- ditahun 2016 menjadi Rp. 157.469.099.183,- ditahun 2017.

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

Rasio Kemandirian keuangan daerah mengalami tren peningkatan hal ini dapat dilihat pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 rasio kemandirian keuangan hanya 11,95 % ditahun 2015,13,16 % ditahun 2016, 17,88% ditahun 2017, 14,69% ditahun 2018 dan 15,44% ditahun 2019 atau meningkat sebesar 3,49% atau rata-rata rasio kemandirian keuangan sebesar 14,62%. Hal ini disebabkan karena tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli daerah (PAD) yang mengalami tren kenaikan persentase walaupun peningkatannya masih sangat kurang .

Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

Rasio Ketergantungan keuangan daerah mengalami tren penurunan hal ini dapat dilihat pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 rasio ketergantungan keuangan sebesar 89,30 % ditahun 2015,88,25 % ditahun 2016, 83,81% ditahun 2017, 82,97% ditahun 2018 dan 82,47% ditahun 2019 atau menurun sebesar 6,83% atau rata-rata rasio kemandirian keuangan sebesar 85,36%. Hal ini disebabkan karena tingkat Pendapatan Asli daerah (PAD) yang mengalami tren kenaikan persentase walaupun peningkatannya masih sangat kurang sehingga tingkat ketergantungan mengalami penurunan ini berarti bahwa kabupaten gowa mampu menurunkan tingkat ketergantungan keuangan daerah.

Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

Rasio Pertumbuhan Pendapatan daerah mengalami tren penurunan Persentase hal ini dapat dilihat pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 rasio Pertumbuhan Pendapatan daerah sebesar 11,13 % ditahun 2015/2016,11,04 % ditahun 2016/2017, - 0,,50% ditahun 2017/2018, 5,01% ditahun 2018/2019 atau menurun sebesar 6,12% Hal ini disebabkan karena tingkat pertumbuhan pendapatan selama lima tahun masih sangat rendah.baik itu Pendapatan Asli daerah maupun pendaptan transfer hanya lain-lain pendaptan daerah yang sah yang mengalami peningkatan yang besar secara persentasi tapi tidak terlalu banyak pengaruhnya terhadap pendaptan secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2015 sampai 2019 dengan persentase rata-rata 12,44% dengan kriteria kemampuan keuangan daerah kurang, artinya PAD belum terlalu besar memberikan iuran/sumbangan yang berarti bagi pendapatan daerah kabupaten Gowa.

Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2015 s/d 2019 dengan persentase rata-rata 49,74% dengan kriteria Baik, ini berarti bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi pendapatan Daerah Tren menurun walaupun persentasinya kecil sebesar 7.33%. Kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2015 s/d 2019 dengan persentase rata-rata 19,28% dengan kriteria Kurang. Rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten gowa masih sangat rendah dengan persentase rata-rata dari tahun 2015 s/d 2019 sebesar 14,62% hal ini disebabkan karena masih rendahnya pendapatan Asli daerah.

Masih tingginya rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten gowa terhadap Pendapatan transfer dari pusat dan provinsi yang persentase rata-rata dari tahun 2015 s/d 2019 sebesar 85,36 % pertahunnya. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Kabupaten Gowa mengalami tren penurunan sehingga peningkatan pertumbuhan pendapatan kabupaten gowa hanya sebesar rata-rata dari tahun 2015 s/d 2019 sebesar 6,67 % pertahunnya.

SARAN

Saran yang dapat diajukan penulis berkaitan dengan hasil analisis ini adalah Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Gowa dapat meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan Kabupaten Gowa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menganalisis kontribusi sumber-sumber PAD dan bisa mengupas lebih lanjut PAD sebagai penggerak kemandirian ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 142
- Astuti, N. P. 2019. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah kabupaten sleman 2012-2016*. Jurnal Akuntansi
- Atika Nita, dkk. *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018*. available at <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pek/index>. Vol. 3 No. 1, 5 Maret 2020
- _____. 2006, "Sistem Akuntansi Publik". Jakarta: PT. Salemba Empat
- Baihaqi, Fauzan. 2011. *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu*. Jurnal Akuntansi.
- Ghazali, Syamni, 2009, *Analisis Kontribusi dan Efektifitas Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara*, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh : Aceh.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT.Salemba Empat
- _____. 2004. *Manajmen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kusuma W. Adawiyah, I. C. *Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai belanja daerah kota Bitung*, Jurnal Akunida ISSN 2442-3033 Volume 1 Nomor 1, Juni 2015
- Mardiasmo. 2002. "Akuntansi Sektor Publik", Andi Yogyakarta
- Mbembe Elisabeth. 2018. *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah*. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
- _____. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Republik Indonesia, 1999. "UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah", Jakarta.
- _____. 2004. "UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah", Jakarta.
- _____. 2004. "UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah", Jakarta. 2004. "UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah", Jakarta.
- Undang-undang No.71 Tahun 2010 Tentang **Standar Akuntansi Pemerintah**
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wenur GebrianyPirade. 2013.*Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerahdalam membiayai belanja daerah kota Bitung*. Skripsi. Tidak dipublikasikan. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Yoyo Sudaryo, et. all., *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2017), hal. 85